

SEKOLAH CERDAS UNTUK PENDIDIKAN ANAK MARJINAL

Asril

FKIP Universitas Riau, Pekanbaru

E-mail: asril.unri@gmail.com

Abstract: ‘Education for all’ appeared not to the marginalized community across Pekanbaru. This study aimed to describe the presence of Sekolah Cerdas which was dedicated to the marginalized community in Pekanbaru. This study was also revealed its academic activities, including school resources such as finance and teachers. Data was obtained, through technique of documentation, interviews, and observation from informants who related such as government (Education Department in Pekanbaru), principals of Sekolah Cerdas, teachers, parents, and students. Data then was analyzed descriptively according to categorization of focuses and its context. The research found that Sekolah Cerdas that has been established since 2007 experienced an increase number of students; starting from 37 students in 2007 to 62 students in 2014. Those numbers proved that the presence of Sekolah Cerdas was able to accommodate the needs of education for the marginalized. On the other hand, these figures could be used as a small evidence of the increasing numbers of marginalized - if not referred to as an alarm for the development.

Abstrak: ‘Pendidikan untuk semua’ sepertinya belum menjamah kaum marjinal secara keseluruhan di Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kehadiran Sekolah Cerdas sekolah bagi kaum marjinal di Pekanbaru. Kajian ini juga bertujuan mengungkap kegiatan akademiknya, termasuk sumberdaya yang dimiliki sekolah ini seperti keuangan dan guru. Data diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi, dari para narasumber terkait, seperti pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru), pimpinan Sekolah Cerdas, guru, orangtua, dan siswa. Data kemudian dianalisis secara deskriptif menurut kategorisasi dan konteksnya. Hasil penelitian menemukan bahwa Sekolah Cerdas yang telah berlangsung sejak tahun 2007 menunjukkan peningkatan jumlah siswa; di awali dengan 37 siswa menjadi 62 siswa di tahun 2014. Angka-angka itu sekaligus menjadi bukti kecil bahwa kehadiran Sekolah Cerdas mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan bagi kaum marjinal. Sebaliknya di sisi lain, angka tersebut dapat dijadikan bukti kecil bertambahkan anak marjinal jika tidak ingin disebut sebagai *alarm* bagi aspek pembangunan.

Kata Kunci: pendidikan, sekolah cerdas, anak marjinal

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru sebagai ikon pendidikan bagi masyarakat di Propinsi Riau tidak luput dari persoalan anak marjinal. Di kota ini potret kaum marjinal dapat dilihat dari adanya anak-anak yang mencari nafkah di perempatan jalan lampu lalu lintas, yang mengemis, atau menjadi gelandangan. Diantaranya ada yang terpaksa berjualan koran, kadang sambil menghiba diberi tambahan pembayaran, penjual mainan anak, hingga pengamen jalanan. Hidup mereka hanya bersumber dari rasa belas kasihan masyarakat lain yang merasa kasihan melihat keadaan mereka.

Mereka diantaranya ada yang bersekolah, bersekolah tidak tamat dan bahkan tidak ingin menamatkan sekolahnya. Dari kelompok mahasiswa UIN (Universitas Islam Negeri)

SUSKA Pekanbaru yang melakukan pembinaan anak jalanan, sejak tahun 2007, diperoleh informasi bahwa sebagian besar alasan para anak jalanan tidak bersekolah adalah karena alasan ekonomi, dan sekolah dianggap menghabiskan uang. Bagi orang tua mereka yang kebanyakan pekerjaannya tidak menentu, sekolah anaknya cukup ditempuh hingga pandai baca tulis hitung untuk sekedar bisa bertahan hidup; bahkan tidak sedikit orang tua menugaskan mereka untuk mencari uang guna menambah pendapatan keluarga. Masalahnya adalah apabila keadaaan ini tidak diatasi, maka akan berdampak pada kualitas generasi muda dimasa yang akan datang. Kondisi masyarakat marjinal bila dibiarkan berlarut-larut dapat memberi dampak negatif yang lebih luas, terutama pada menurunnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) bangsa Indonesia. Misalnya,

bertambahnya jumlah anak putus sekolah dan buta huruf, angka pengangguran yang tidak terbendung, dan penyakit sosial dan kerawanan/kriminalitas sosial.

Tulisan tentang anak marjinal di Kota Pekanbaru ini mencoba mengenalkan satu upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi masalah di bidang pendidikan. Tulisan ini juga menjadi awal data bagi penulisan tesis yang mengkaji ilmu manajemen pendidikan dengan topik bahasan evaluasi pelaksanaan pendidikan anak marjinal di Pekanbaru. Kebijakan di bidang pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan manusia yang mampu pada tataran akademis dan non akademis untuk mampu siap menghidupi diri. Ia menjadi manusia mandiri, dewasa, mampu lebur menjadi bagian dalam masyarakat disekitarnya, serta mampu bertanggungjawab atas dirinya (tidak menjadi beban). Upaya pemerintah yang dimaksud adalah dengan pendirian dan pengelolaan sekolah bagi pendidikan anak marjinal. Sekolah itu disebut Sekolah Cerdas.

Pendekatan pendidikan, suatu kebijakan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Pendidikan yang diberikan ini dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Pemberian nilai-nilai yang baik dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan moralitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semuanya terangkum dalam suatu kebijakan yang perlu diimplementasikan. Implementasi suatu program/kegiatan merupakan pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di ambil. Lebih luas lagi, implementasi ini merupakan bagian dari sistem yang lebih luas. Suatu sistem, tidak akan berjalan, apabila tidak diimplementasikan dalam berbagai program/kegiatan.

Proses implementasi menurut para ahli memiliki banyak model. Salah satu modelnya adalah model proses atau alur Smith. Tajhcan (2006) mengambil pandangan Smith bahwa, dalam proses implementasi ada sejumlah variabel yang perlu diperhatikan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik; oleh karena itu dapat terjadi kete-

gangsan-ketegangan (*tensions*) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik lainnya

Dalam membahas kebijakan, Solichin AW (2011) mengutip tiga pendapat ahli Heclo, David Easton, dan Jenkins. Menurut Heclo suatu kebijakan itu lebih baik jika dipandang sebagai tindakan yang sengaja dilakukan atau ketidakmauan untuk bertindak secara sengaja dari pada dipandang sebagai keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan tertentu; D. Easton menyatakan bahwa kebijakan adalah '*a policy ... consists of a web of decisions and action that allocate ... values*', artinya kebijakan ... terdiri dari serangkaian keputusan dan tindakan untuk mengalokasikan ... nilai-nilai); WL. Jenkins menyatakan kebijakan adalah '*a set of interrelated decision ... concerning the selection of goal and the means of achieving them within a specified situation*' (serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait ... berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu). Selanjutnya, kebijakan, menurut Muhadjir (1993), merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas dasar keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dari berbagai pendapat para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan merupakan rangkaian konsep dan dasar kebijakan yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Kebijakan pendidikan juga berhubungan dengan kebijakan publik. Arah penetapan kebijakan pendidikan bersumber dari keinginan publik. Hal ini senada dengan yang dikatakan Tilaar (2008) bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum,

yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan di pahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan secara keseluruhan.

Melengkapi argumentasi kebijakan pendidikan, Rohman (2009) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidikan anak marginal yang dilaksanakan dengan pendekatan formal bertujuan untuk memberikan layanan khusus bagi anak-anak usia SD/SMP agar secara sistemik tetap belajar di sekolah dalam kebijakan pendidikan dasar. Dalam kerangka deskripsi pendidikan anak marginal bertujuan untuk membentuk manusia pembelajar yang berfikir kritis, sedikitnya secara bertahap mampu menjawab persoalan hidup yang terintegrasi dalam materi pembelajaran tingkat satuan pendidikan. Pada tahap bimbingan teknis dibutuhkan proses untuk mengeksplorasi masa depan (*thinking the future*) dalam makna faktual untuk meringankan berbagai belenggu psikologis. Pendidikan anak marginal yang dilaksanakan dengan mengaplikasikan kurikulum persekolahan, mengacu kepada standarisasi kalender waktu yang ditetapkan berdasarkan target hari belajar efektif, jam belajar efektif serta tingkat disiplin penguasaan materi yang dikenal dengan pencapaian target kurikulum dan pencapaian target daya serap (Mursyal, 2007).

Upaya meningkatkan mutu pendidikan merupakan tugas yang berat, yang tidak hanya

menyangkut permasalahan teknis pendidikan tetapi juga mencakup persoalan perencanaan, pendanaan dan efisiensi penyelenggaraan sistem sekolah itu sendiri. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu pendidikan dengan sendirinya memerlukan penataan pendidikan yang lebih baik.

Pengelolaan pendidikan merupakan alternatif strategik untuk mencapai keberhasilan upaya peningkatan mutu atau kualitas pendidikan di Sekolah Dasar. Manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan di sekolah dasar. Tulisan ini pun dimaksudkan sebagai langkah identifikasi bagi penulisan ilmiah lebih lanjut. Oleh karena itu tulisan awal ini membatasi fokus bahasan Sekolah Cerdas ini meliputi: (1) Dasar Hukum; (2) Profil; (3) Kurikulum; (4) Keuangan; dan (5) Sumber Daya Manusia.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Cerdas, sekolah yang ditujukan bagi anak-anak marginal di wilayah Kota Pekanbaru. Sekolah Cerdas yang berlokasi di Kecamatan Tampan Pekanbaru ini sengaja dipilih dalam penelitian ini. Sekolah Cerdas merupakan sekolah ini dikhususkan untuk anak-anak jalanan dan anak orang miskin/kurang mampu. Inilah tipikal sekolah marginal sekolah bagi kaum yang termarjinalkan. Waktu penelitian dilaksanakan selama hampir empat bulan dimulai di tengah tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan apresiasi pada proses yang berlangsung daripada suatu hasil akhir. Marshal dalam Sarwono (2006), menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Agar fokus pada proses yang dikaji dapat memperoleh data yang valid, instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri.

Guna pengumpulan data yang diperlukan, peneliti dengan sengaja menetapkan sumber-sumber informasi, dikenal dengan istilah *purposive sampling*, yakni penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu. Sampel yang *purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat, sehingga relevan dengan rancangan penelitian. Mereka yang menjadi narasumber disebut informan. Mereka adalah pihak yang mewakili pemerintah dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, pihak sekolah yang terdiri dari pimpinan sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Pengumpulan data baik pada tahap wawancara maupun observasi, peneliti menggunakan lembar/panduan observasi dan wawancara peneliti, sedangkan studi dokumen dengan menggunakan daftar *check list*.

Selanjutnya data yang telah diperoleh dilanjutkan dengan tahap analisis data. Analisis data menggunakan Model Mile & Huberman dimana proses analisis setelah data dikumpulkan dilanjutkan tahap dengan tahap Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Pada tahap reduksi dilakukan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data hasil catatan lapangan. Seleksi data dilakukan dalam upaya menetapkan mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak, sehingga dapat mengelompokkan, menyeleksi, mencari hal-hal yang penting difokuskan, mempertajam dan mengorganisir data yang diperoleh sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data merupakan proses pemberian sejumlah informasi yang telah disusun sehingga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil tindakan, yakni sajian data yang telah direduksi dalam bentuk matrik, format, narasi dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Cerdas adalah salah satu sekolah marjinal yang terdapat di Pekanbaru yang didirikan oleh LKP Sospolbud Provinsi Riau. Sekolah Cerdas ini didirikan dengan tujuan: (1) tidak ada lagi anak-anak jalanan yang tidak bersekolah di Riau terutama di Pekanbaru sebagai pilot proyek; (2) memberikan pembinaan kepada generasi muda terutama anak-anak jalanan; (3) membangun kebersamaan diantara komunitas anak-anak jalanan; (4) memberikan *soft*

skill dan *hard skill* kepada anak-anak jalanan, dan (5) memberikan pelatihan dan pengembangan potensi kepada anak jalanan.

Tujuan Sekolah Cerdas ini ada yang telah terwujud, namun ada juga yang belum terwujud. Untuk butir 2 dan 3, Sekolah Cerdas telah melaksanakannya dengan baik. Untuk butir 1, masih ada juga anak jalanan di Pekanbaru yang belum bersekolah. Tidak mudah mengajak mereka yang di ‘jalan’ untuk bersekolah. Sedangkan butir nomor 4, Sekolah Cerdas masih terhambat dalam sarana dan prasarana. Peningkatan *soft skill* dan *hard skill* selain membutuhkan pengetahuan, juga membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang. Minimnya sarana dan prasarana yang tersedia, menyebabkan hal ini masih merupakan kendala bagi Sekolah Cerdas. Untuk butir 5, Sekolah Cerdas berusaha untuk membina minat dan bakat siswanya untuk dikembangkan se-maksimal mungkin.

Profil Sekolah

Bagaimana Sekolah Cerdas ini awalnya terbentuk dijelaskan oleh informan Kepala Sekolah Cerdas bahwa sekolah dibentuk sebagai bentuk lembaga pendidikan informal. Untuk itulah diberi nama LKP Sospolbud. LKP Sospolbud ini dimasukkan ke dalam kelompok layanan khusus di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Sekolah yang menjadi penanggung jawabnya secara akademik adalah Sekolah Dasar Negeri 079 (dulunya bernama Sekolah Dasar Negeri 034) Sukajadi. Sekolah Dasar Negeri 079 ini dijadikan Sekolah Induk yang bertanggung jawab mengeluarkan ijazah. Ketika siswa Sekolah Cerdas meraih kelas enam (6), mereka diharuskan berpindah menjadi siswa sekolah induk (SDN 079).

Di Pekanbaru terdapat banyak anak usia sekolah yang telah putus sekolah. Anak-anak ini adalah anak-anak dari keluarga miskin. Anak-anak ini tidak bersekolah maupun putus sekolah. Anak-anak ini bekerja pada saat jam sekolah, sehingga mereka membolos dari sekolah dan akhirnya berhenti. Untuk mengatasi keadaan itu, atas keinginan tokoh masyarakat, dan berkoordinasi dengan pejabat pendidikan setempat serta

Sekolah Dasar Negeri, maka dibentuklah Kelompok Belajar (Pokjar) Marjinal Sukajadi. Pokjar ini merupakan cikal bakal Sekolah Cerdas Pekanbaru.

Diawal pendiriannya proses belajar mengajar di mulai dari jam 13.00-15.00 atau setelah mereka selesai bekerja/berjualan. Secara sistem kelompok belajar marjinal ini menumpang di SD/MI yang ada di daerah tersebut yang sekaligus dijadikan Sekolah Induk. Namun karena wilayah jalan Suka Karya sekolahnya sedikit dan penduduknya padat, sehingga tidak ada Sekolah Dasar atau Madrasah yang bisa digunakan sehingga terpaksa mengontrak rumah sebagai lokasi tempat belajar mengajarnya.

Siswa kelas 1 hingga kelas 5 belajar di Sekolah Cerdas dan siswa kelas 6 pindah ke Sekolah Induk yaitu Sekolah Dasar Negeri 079 Sukajadi. Prosedur ini telah sesuai dengan ketentuan pendirian sekolah marjinal, yakni penggabungan penggabungan anak-anak marjinal ke Sekolah Induk.

Berkenaan dengan sarana dan prasarana tidak ada sistem penghapusan. Sarana dan prasana yang tersedia, digunakan terus sampai habis/rusak hingga tidak bisa di pakai lagi. Apabila telah habis/rusak maka baru diminta yang baru. Penyediaan yang baru ini pun, tergantung dari ketersediaan dana yang tersedia. Penggunaan sarana dan prasarana tidak direncanakan secara sistematis. Apa yang ada dan dibutuhkan itu yang dipergunakan. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah disediakan dari Sekolah Induk. Sekolah Cerdas mengajukan permohonan sarana dan prasarana, kemudian Sekolah Induk mengecek ketersediaan dana BOS untuk Sekolah Cerdas. Apabila masih memungkinkan maka, sarana dan prasarana yang diminta akan diberikan. Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi, maka sarana dan prasarana yang diminta ditangguhkan untuk semester berikutnya atau tahun berikutnya. Sarana dan prasana yang tersedia, digunakan terus sampai habis/tidak bisa di pakai lagi. Apabila telah habis/rusak maka baru diminta yang baru. Penyediaan yang baru ini pun, tergantung dari ketersediaan dana yang tersedia.

Pengadaan sarana dan prasarana Sekolah

Cerdas disediakan dari Sekolah Induk. Sekolah Cerdas mengajukan permohonan sarana dan prasarana, kemudian Sekolah Induk mengecek ketersediaan dana BOS untuk Sekolah Cerdas. Apabila masih ada maka, sarana dan prasarana yang diminta akan diberikan. Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi, maka sarana dan prasarana yang diminta ditangguhkan untuk semester berikutnya maupun tahun berikutnya.

Mengiringi semangat para guru dan penge-lola sekolah untuk mencerdaskan anak marjinal, ada kenyataan bahwa daya tampung Sekolah Cerdas sangat terbatas, karena keterbatasan ruangan. Satu ruangan maksimal bisa ditempati 10-15 orang siswa. Jadi daya tampung sekolah ini seluruhnya maksimal adalah 75 orang siswa yang terdiri atas kelas satu sampai kelas lima. Hal ini telah memenuhi persyaratan minimal pe-nyelenggaraan sekolah marjinal yang tercantum pada Juknis (Petunjuk Teknis) Perlindungan Pendidikan Anak Marjinal, bahwa ‘Jumlah peserta didik pendidikan perlindungan anak marjinal adalah minimal 20 orang.

Sekolah Cerdas memiliki jumlah siswa sebanyak 62 orang, yang dirinci per kelas: Kelas I berisi 18 siswa; Kelas II berisi 13 siswa; Kelas III berisi 9 siswa; Kelas IV berisi 7 siswa; Kelas V berisi 9 siswa, dan Kelas VI berisi 6 siswa. Berdasarkan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan marjinal, jumlah siswa Pokjar Sukajadi Sekolah Cerdas ini telah melebihi standar minimal. Namun kalau dilihat dari jumlah perkelas, tidak ada kelas yang mencapai standar minimal. Hal ini disebabkan karena banyaknya siswa yang berhenti sekolah. Penerimaan rata-rata siswa per angkatan per tahun adalah 25 orang, namun seiring berjalannya proses pembelajaran ada siswa yang keluar/berhenti sekolah sehingga jumlah siswanya menjadi semakin berkurang.

Penerimaan siswa awalnya dilakukan dengan mendata para anak jalanan yang tidak bersekolah agar bersekolah. Uniknya karena siswa Sekolah Cerdas berasal dari lingkungan dan faktor sosial ekonomi yang kurang mampu maka proses penerimaan siswa baru dilakukan dengan cara, guru berkunjung ke rumah calon

siswa sekaligus menganalisis apakah anak tersebut layak diterima atau tidak. Calon siswa yang orang tua/walinya dinilai memiliki perekonomian yang mampu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri maka akan mereka akan ditolak. Kini penerimaan siswa baru dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, tidak perlu lagi promosi persuasif karena masyarakat telah mengetahui ada Sekolah Cerdas, sayangnya daya tampung terbatas. Pendaftaran siswa baru dimulai dengan mengisi formulir oleh orang tua/wali dan melampirkan KTP/K, disertai surat keterangan miskin dari RT/RW tempat tinggalnya.

Kurikulum

Pendidikan majinal di Pekanbaru merupakan suatu program pendidikan yang diberikan kepada anak-anak jalanan dan miskin yang terdapat di Pekanbaru. Rata-rata siswanya adalah mereka yang tidak bersekolah maupun yang tidak menamatkan sekolahnya, disebabkan oleh masalah ekonomi. Ada juga anggapan dari sebagian anak jalanan ini, bersekolah hanya menghabiskan uang, sedangkan tamat sekolah mau jadi apa? Mereka bekerja dari pagi hingga sore hari sehingga tidak sempat untuk bersekolah. Sekolah bagi mereka hanya sarana agar pandai membaca dan menulis. Anak-anak seperti inilah yang direkrut oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, disatukan kedalam satu Sekolah Marjinal yang diberi nama Sekolah Cerdas.

Tujuan pendirian sekolah marjinal ini untuk mendukung percepatan wajib belajar 9 tahun di Pekanbaru, dan memberantas buta huruf. Dengan alasan bekerja, para anak jalanan ini bolos/cabut dari sekolah. Mereka lebih memilih pekerjaan dari pada belajar di sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, maka diadakan pokjar marjinal Sekolah Cerdas, sehingga mereka bisa belajar pagi maupun sore hari tanpa terikat jam resmi persekolahan.

Sekolah cerdas juga merekrut anak-anak dari masyarakat yang secara ekonomi sangat tertinggal. Anak-anak mereka tidak bersekolah maupun putus sekolah. Banyaknya aturan yang dibuat oleh sekolah formal, menyebabkan

mereka tidak sanggup untuk memenuhi hak dan kewajiban untuk bersekolah di sekolah formal. Hak dan kewajiban ini seperti atribut (baju, sepatu, buku dan lain-lain), keuangan (iuran, komite dan lain-lain meskipun telah ada dana BOS namun secara prakteknya uang pungutan ini masih ada walaupun kecil).

Salah satu keunikan Sekolah Cerdas ini adalah setiap pagi harus Sholat Dhuha dulu, baru belajar. Hal ini wajib dilaksanakan. Kalau dulu waktu Kepala Sekolah buk Iren ada pelatihan Nasid tetapi sekarang tidak lagi. Selama 2 tahun inilah tidak ada Nasid lagi.

Sekolah Cerdas memberikan penekanan utama pada didikan moral keagamaan dan budi pekerti. Hal ini diwujudkan dengan kewajiban sholat Dhuha setiap paginya secara bersama-sama sebelum pembelajaran di mulai. Sekolah Cerdas juga tidak menekankan pada atribut siswa. Siswa Sekolah Cerdas tidak diwajibkan menggunakan baju seragam dan memakai sepatu seperti sekolah-sekolah lainnya. Yang penting mereka berbusana yang sopan, yang wanita memakai jilbab, kemudian memakai sendal juga tak apa-apa. Hal ini disebabkan orang tua/wali tidak semuanya mampu membeli baju segaram sekolah dan sepatu untuk anaknya. Kekhususan sekolah ini seperti pengembangan keagamaan. Anak yang wanita wajib memakai jilbab, yang laki-laki memakai peci. Terus sholat bersama setiap paginya. Kadang-kadang pelatihan nasid.

Alasan menjalankan kurikulum ini lebih menggunakan pendekatan religi, menurut informan guru Sekolah Cerdas mengungkapkan bahwa: Perlu menekankan pengembangan ciri-ciri khas sekolah berlandaskan agama Islam karena anak-anak ini menghadapi hidup yang keras, karenanya mereka perlu mengenal agama dan bermoral. Seperti, Sholat Dhuha bersama setiap paginya, bernasyid dan kegiatan keagamaan lainnya.

Semua siswa sekolah cerdas menggunakan atribut busana islami pada hari tertentu. Siswa Sekolah Cerdas tidak diwajibkan menggunakan baju seragam dan memakai sepatu seperti sekolah-sekolah lainnya. Yang penting mereka berbusana yang sopan, yang wanita memakai jilbab,

kemudian memakai sendal juga tak apa-apa. Hal ini disebabkan orang tua/wali tidak semuanya mampu membeli baju segaram sekolah dan sepatu untuk anaknya. Pakaian anak yang penting muslim, tidak ada baju seragam, tidak pakai sepatu hanya pakai sendal, namun dalam tahun ini sudah dibelikan baju dari dana BOS.

Pendidikan pada dasarnya memegang peran yang sangat penting dalam membina sikap mental dan moral masyarakat. Secara umum pendidikan memiliki tujuan untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaan secara menyeluruh dan seimbang, sehingga dapat dengan benar-benar menjadi manusia yang utuh dalam arti manusia yang dapat mengenali dirinya serta mengenali martabat kemanusiaan. Manusia yang demikian sudah barang tentu dapat membedakan diri dari belenggu kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan.

Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Artinya bahwa manusia sepanjang hidupnya membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pertama adalah bahwa belajar haruslah dilakukan secara terus menerus, seumur hidup, dan berkelanjutan. Kedua, bahwa semua lapisan masyarakat Indonesia harus dapat mengakses segala jenis dan tingkatan pendidikan yang diperlukan dan sesuai untuknya. Ketiga, bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, baik Pendidikan Sekolah maupun Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan dapat memberi keyakinan bahwa setiap individu dari masyarakat Indonesia dapat dan telah mengenyam pendidikan yang layak.

Hal terpenting yang harus dilakukan pada anak-anak miskin adalah bagaimana mengembangkan potensi mereka yang hanya mampu mengenyam pendidikan dasar atau malah kurang dari itu dengan cara mengajarkan anak untuk mengajukan pertanyaan sendiri secara kreatif dengan benar sesuai dengan permasalahannya dari pada menjawab pertanyaan orang/guru secara benar tapi tidak mengetahui/mengerti makna dari pertanyaan itu yang lebih mengandalkan hafalan.

Dari segi kondisi hidup yang mereka jalani, karena keseharian mereka sudah dipenuhi aktivitas mencari nafkah, sistem sekolah menjadi tidak adaptif terhadap mereka, terutama dari segi waktu belajar di sekolah dan persiapan belajar di rumah. Persaingan yang terjadi saat ini sangatlah tinggi (misalnya persaingan di bangku sekolah untuk mendapatkan nilai, peringkat, ataupun memasuki sekolah – sekolah unggulan). Sudah menjadi *tren* dan kepercayaan tersendiri untuk meningkatkan kualitas belajar dengan mengikuti, kursus, atau bimbingan belajar, yang saat ini telah menjadi salah satu lapangan tersendiri dalam bisnis pendidikan. Bagi masyarakat miskin, model persaingan seperti ini tentu jauh dari jangkauan.

Dalam bidang pendidikan, masyarakat marginal sangat tertinggal dengan penduduk yang ada disekitarnya. Bagi mereka, ilmu sangat sulit di dapatkan. Mereka juga tidak mampu merasaikan manfaat dari teknologi yang berkembang, baik di bidang pendidikan atau pun bidang lainnya.

Menurut Dian C mengelompokkan kaum marginal, yaitu mereka yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dengan batasan “wajib belajar” dari negara. Dengan kata lain, mereka yang terpinggirkan dalam hal pendidikan karena tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai pendidikan. Selain itu, pengertian marjinal bisa dikatakan adalah kaum pinggiran, kaum miskin, indigo. Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan di sini. Kaum marjinal bisa dikatakan kaum pinggiran atau kaum miskin yang dibawah kemiskinan. Jika dikaitkan bahwa persoalan surutnya pendidikan karena adanya kesenjangan ekonomi, maka generasi muda yang ideal adalah mereka yang berasal dari kalangan masyarakat marjinal.

Kurikulum Sekolah Cerdas ini mengikuti kurikulum Sekolah Induk. Perubahan kurikulum di Sekolah Induk, maka Sekolah Cerdas juga menyesuaikan kurikulumnya. Hal ini untuk mengejar target siswa kelas 6 yang akan pindah ke Sekolah Induk untuk menamatkan sekolahnya dan mengikuti UN. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum pendidikan yang berlaku

berdasarkan standar nasional, terutama pengembangan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran tematik yang memprioritaskan keterampilan calistung (membaca, menulis dan berhitung) di kelas rendah Sekolah Dasar.

Pelaksanaan kurikulum di Sekolah Cerdas telah memuat seluruh mata pelajaran yang ditentuan oleh UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab IX Standar Nasional Pendidikan Pasal 37 Ayat 1. Kelemahannya adalah dalam mengimplementasikan keterampilan/kejuruan Sekolah Cerdas tidak memiliki saranan dan prasarana pendukung. Untuk mengatasi masalah ini, maka pihak Sekolah Cerdas melakukan kerjasama dengan berbagai LSM yang ada di Pekanbaru diantaranya adalah LSM Riau Mengajar. LSM Riau Mengajar memberikan berbagai keterampilan kepada siswa-siswi Sekolah Cerdas diantaranya adalah pelajaran Komputer. LSM Riau Mengajar membawa siswa Sekolah Cerdas melakukan praktik komputer di Labor FMIPA Universitas Riau.

Jadi, kurikulum pendidikan sekolah marjinal sama dengan kurikulum pendidikan sekolah umum lainnya. Untuk Sekolah Cerdas kurikulum ini mengikuti perkembangan kurikulum di Sekolah Induk. Guru-guru di Sekolah Cerdas telah ada yang dikirim untuk mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 ke Sekolah Induk maupun mengikuti pelatihan-pelatihan lainnya. Jadi dari segi kurikulum Sekolah Cerdas telah memenuhi syarat kriteria penyelenggaraan sekolah marjinal.

Proses belajar mengajar di Sekolah Cerdas dilaksanakan hari Senin sampai Jum'at. Hari Sabtu dikhkususkan untuk kegiatan Ekstra Kurikuler. Materi pelajaran hari Senin sampai hari Jum'at adalah materi sekolah yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Siswa belajar menggunakan buku dari Sekolah Induk dan mendapatkan materi yang sama dengan Sekolah Induk. Bedanya materi yang sepatutnya diberikan 6 hari (Senin – Sabtu) dipadatkan menjadi lima hari. Khusus hari Sabtu pembelajaran yang diberikan hanya bersifat ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Cerdas diselenggarakan oleh LSM-LSM pendidikan yang ada di Pekanbaru. Diantaranya adalah Riau

Mengajar. Lembaga Riau Mengajar memberikan pelatihan menggambar, mewarnai, menonton bersama, pelatihan komputer dan kegiatan lainnya.

Jam belajar Sekolah Cerdas tetap mengikuti jam pelajaran di Sekolah Induk. Namun sesuai dengan kesepakatan jam belajar di Sekolah Cerdas hanya diselenggarakan hari Senin sampai Jum'at. Hari Sabtu tidak diselenggarakan proses belajar mengajar. Hari Sabtu ini dikhkususkan untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga mengajar yang ada di Pekanbaru yang bekerja sama dengan Sekolah Cerdas. Diantara lembaga mengajar yang paling aktif mengisi kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Cerdas adalah Riau Mengajar. Lembaga Riau Mengajar memberikan pengajaran seperti menggambar, menonton film bersama, pelatihan komputer dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi dari segi jam mengajar Sekolah Cerdas telah sesuai dengan standar pendidikan sekolah marjinal. Hal ini telah sesuai dengan panduan penyelenggaraan pendidikan marjinal yaitu :

Jam belajar mengikuti sistem pendidikan formal yang dilakukan di sekolah. Mengingat untuk memberikan layanan khusus, maka perubahan waktu bisa terjadi dalam kesepakatan akan tetapi jumlah jam pelajaran tidak boleh berkurang

Kelompok belajar di Sekolah Cerdas di kelompokkan sesuai dengan tingkatan kelas yaitu dari kelas I hingga kelas VI. Begitu juga dengan siswa yang telah putus sekolah dikelompokkan sesuai dengan kelas yang akan dilanjutkannya dari sekolah asal. Hal ini seperti yang tercantum dalam panduan penyelenggaraan pendidikan marjinal:

Kelompok belajar dilakukan berdasarkan umur, kemampuan dan kelas yang ditinggal sebelum anak-anak tersebut putus sekolah, atau sebagai pendidikan lanjutan.

Sekolah Cerdas diselenggarakan di rumah buatan yang memiliki 5 ruang. Masing-masing kelas menempati ruangan tersendiri, kecuali untuk kelas III dan IV digabung dalam satu ruang dengan menggunakan pembatas kain. Kelas lainnya telah memiliki ruang tersendiri. Dari segi

ruang belajar ini, Sekolah Cerdas lebih bagus dari standar penyelenggaraan pendidikan marjinal, meskipun siswanya masih duduk di lantai dengan menggunakan meja kecil sebagai meja tulis. Hal ini sesuai dengan panduan penyelenggaraan pendidikan marjinal :

Kegiatan belajar dapat menggunakan sistem paralel, atau berada dalam satu ruang dengan kelas berbeda. Artinya di kelas (ruang belajar) tersebut terdapat tiga kelas dengan kelompok belajar yang berbeda

Pembelajaran di sekolah cerdas dilakukan oleh guru huni sebanyak 6 orang guru. Dari hasil pengamatan penulis pada saat observasi, pengajaran dilakukan dengan sistem klasikal, guru ceramah dan anak-anak mendengarkan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta pemberian tugas maupun kuis oleh guru. Guru juga memberikan kesempatan kepada para siswanya untuk belajar bersama dengan teman sebaya, dan kadang-kadang melakukan game/permainan dalam pembelajaran. Hal ini telah sesuai dengan panduan penyelenggaraan pendidikan marjinal. Belajar dipimpin oleh guru huni dengan sistem klasikal sesuai dengan kepentingan pendidikan. Selanjutnya dapat dilakukan melalui pendekatan tutorial sebaya.

Selain dikelola oleh guru huni, Sekolah Cerdas memiliki guru kunjung sebanyak 2 orang. Guru kunjung ini secara berkala mengunjungi Sekolah Cerdas dan memberikan pembelajaran kepada anak didik, serta melihat perkembangan kemampuan belajar anak didik.

Sistem absensi Sekolah Cerdas sama seperti sekolah-sekolah lainnya. Guru mengabsen siswa, dan absen ini nantinya akan diserahkan kepada Sekolah Induk sebagai laporan. Perbedaannya dengan sekolah lainnya adalah siswa boleh tidak hadir asalkan dengan alasan yang jelas dan tidak setiap hari. Misalnya selama 2 hari permisi membantu orang tuanya bekerja akan diizinkan oleh gurunya. Penekanan utama pihak Sekolah Cerdas adalah siswa yang berhenti sekolah, kemudian mau masuk lagi. Kalau hal ini tanpa alasan yang jelas, maka pihak Sekolah Cerdas tidak mau menerima siswa tersebut. Hal

ini telah sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pendidikan marjinal yaitu:

Standar minimal pengelolaan administrasi kesiswaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak marginal diantaranya adalah absensi siswa. Sistem absensi siswa di Sekolah Cerdas telah berjalan dengan baik. Hal ini bisa terbukti dari arsip absensi siswa yang ditemukan peneliti pada saat observasi, wawancara dan melakukan pengamatan terhadap penyelenggaraan pendidikan. absensi ini secara berkala dilaporkan ke Sekolah Induk.

Keuangan

Keuangan sekolah berasal dari dana BOS (Bantuan Operasional). Siswa Sekolah Cerdas mendapat bantuan dana BOS seperti siswa sekolah formal lainnya. Dana BOS inilah yang digunakan untuk memfasilitasi kelengkapan belajar siswa, seperti pakaian siswa, sewa gedung dan lain-lain. Secara administratif, karena data anak sudah bergabung dengan data BOS di Sekolah Induk maka semua anak juga diperhitungkan dalam dana BOS. Setiap anak mendapat alokasi dana pendidikan sebesar Rp.580.000,- per siswa per tahun, sama dengan siswa lain di sekolah lain. Namun demikian ada orangtua yang berkeinginan atau secara sukarela untuk ikut membiayai. Mereka menyumbang uang sebesar sepuluh ribu Rupiah.

Dana BOS yang diperoleh itu tidak otomatis dikelola oleh Kepala Sekolah Cerdas, melainkan sekolah mengajukan keperluan itu kepada sekolah induk, dan akan dipenuhi dalam bentuk natura (bukan uang). Oleh karena itu pertanggung jawabannya ada pada sekolah induk. Secara administratif laporan keuangan yang dibuat sekolah anak marjinal ini hanya pada penggunaan uang yang diterima dalam berbagai bentuk. Misalnya, penggunaan dana BOS sebesar 100.000,- ini digunakan untuk barang dan pembelian administrasi sekolah. Laporan keuangan secara transparan disampaikan kepada orang tua. Sekolah memiliki dana cash yang digunakan untuk membantu uang sewa tempat sekolah.

Selain kegiatan Sekolah Cerdas ini didanai dengan fasilitas BOS. dana Sekolah Cerdas ini

berasal dari bantuan danatur, proposal, dan bantuan dari Dinas Pendidikan, serta orang tua/wali yang mempunyai kelebihan rezki untuk membantu. Danatur berupa bantuan dari tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Pihak Sekolah Cerdas juga membuat proposal untuk diajukan ke tokoh-tokoh masyarakat. Dana dari para donator itu yang digunakan untuk menyewa gedung, membeli sarana dan prasarana sekolah dan lain-lain. Besarnya bantuan tidak pasti, tergantung keikhlasan pemberinya. Kami juga membuat proposal untuk diajukan ke pemerintah kota pekanbaru. Kesulitan paling utama adalah sewa gedung. Dana danatur itu juga bisa dalam bentuk zakat, bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lainnya. Lebaran tahun yang lalu, mereka mendapat zakat dari masyarakat di sekitar sini.

Sekolah Cerdas merupakan sekolah khusus untuk anak-anak jalanan dan dhuafa. Secara umum sekolah ini tidak berbeda dengan sekolah umum lainnya maupun sekolah marjinal lainnya yang terdapat di pelosok atau desa-desa tertinggal. Sekolah Cerdas yang merupakan sekolah marjinal di tengah kota menitik beratkan pada peningkatan agama dan akidah akhlak. Peningkatan akhidah ini mengingat, siswanya para anak jalanan, merupakan contoh figur yang tidak mengenal tata krama moral. Kehidupan para anak jalanan jauh dari etika kesopanan. Untuk itulah didikan utamanya adalah didikan moral keagamaan dan budi pekerti.

Terdapat perbedaan antara ketentuan dan kebijakan pendanaan untuk Sekolah Cerdas. Sebenarnya, penggunaan APBN ini dilakukan sebelum siswa sekolah marjinal masuk ke dalam pendataan dana BOS. Apabila siswa sekolah marjinal sudah memperoleh dana BOS, maka bantuan APBD dihentikan. Dalam kaitan dengan anggaran pengelolaan pendidikan anak marginal, APBD menyediakan alokasi dana untuk menjawab substansi

1. Biaya operasional, (pengelolaan dana kegiatan belajar mengajar yang langsung dilakukan oleh guru huni)
2. Kesejahteraan guru, meliputi honorarium guru dan tenaga pengelola,

3. Bantuan biaya pendidikan siswa, meliputi pembebasan dari segala bentuk iuran (sumbang) serta pakaian sekolah, alat tulis, dll.
4. Biaya monitoring/ supervisi baik tingkat Provinsi maupun Kecamatan.
5. Pelaporan merupakan bagian dari dana operasional mencakup untuk biaya kelompok belajar dan Kepala Sekolah Induk membuat laporan berkala kepada koordinator Kecamatan/ Kota

Biaya operasional Sekolah Cerdas telah mengalami perubahan dari APBD menjadi dana BOS. Pengelolaan dana BOS dikelola langsung oleh guru huni dan guru kunjung serta sekolah induk. Guru huni mengajukan anggaran biaya operasional sekolah kepada sekolah induk, sekolah induklah yang bertanggung jawab untuk memenuhi usulan biaya operasional sesuai dengan anggaran dana BOS yang tersedia.

Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Cerdas didukung oleh guru yang berjumlah 6 orang. Mereka ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemerintah Daerah. Ada 2 jenis guru yang mengajar di Sekolah Cerdas. Yang pertama disebut guru humi sebagai identitas mereka bekerja dengan SK Gubernur; sedangkan yang belum mendapatkan SK Pemda disebut guru sukarela. Guru sukarela yang biasanya dilakukan oleh para mahasiswa yang ingin membantu atau belajar mengajar di Sekolah Cerdas.

Untuk dapat diterima sebagai guru di Sekolah Cerdas, guru disyaratkan memiliki ijazah kependidikan atau gelar S.Pd., dengan jurusan apapun. Namun persyaratan itu kerap dilupakan dengan menerima guru meskipun dengan gelar non-pendidikan, seperti SE (Sarjana Ekonomi). Longgarnya persyaratan itu karena ‘posisi tawar’ sebagai guru berada pada posisi rendah. Artinya, guru kerap berhenti tanpa alasan, lagi pula dalam menjalankan perannya, guru dengan sarjana non-pendidikan dapat dilatih melaksanakan tugas utama yaitu mengajar.

Tidak ada pengumuman tentang penerimaan guru baru; yang dilakukan adalah menjelaskannya sepromosi penerimaan guru. Biasanya guru

diterima secara estapet. Artinya jika ada guru yang berhenti, maka guru yang masih mengajar akan mencari temannya yang bersedia mengajar.

Seorang informan guru yang telah bekerja sejak pertama Sekolah Cerdas ini didirikan, menjelaskan: ‘Tidak ada pengumuman penerimaan guru. Kalau ada guru yang berhenti, kami saja yang cari guru baru, siapa yang mau mengajar di sini’. Hal yang sama juga dijelaskan oleh informan lain, Kepala Sekolah Cerdas tahun 2007-2011). Ia mengatakan: ‘Penerimaan guru tidak diseleksi. Kami yang mencari guru, siapa yang mau mengajar di sini. Guru baru ini sebelum mendapat SK dan gaji, untuk sementara diperoleh dari kumpulan gaji guru yang ada disumbangkan sedikit untuk guru baru. Seorang informan guru yang masih aktif mengatakan ‘Saya mengajar di sini sudah 2 tahun. Awalnya diajak buk Imul pada tahun pada tahun 2012. Setalah mengajar baru nama saya diusulkan ke Dinas Pendidikan untuk mendapat SK Provinsi dan digaji honor daerah’.

Guru Sekolah Cerdas semuanya berdomisili di Pekanbaru. Namun mereka tidak semuanya tinggal/berdomisili di Kecamatan Tampan. Dua orang gurunya berdomisili di Bukit Barisan, satu orang di Rumbai, dua orang di Arengka dan hanya satu orang di Kualu (jalan Suka Karya) tempat diselenggarakannya pendidikan marjinal ini.

Untuk gaji guru yang belum mendapat SK Provinsi ditanggung oleh seluruh guru yang ada. Satu guru menyumbang ± Rp. 200.000,-. Hal ini disebabkan terjadinya keterlambatan pengajuan guru baru. Guru huni yang berhenti adalah guru huni yang telah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, misalnya lulus test CPNS. Pengunduran diri guru yang secara mendadak ini, menyebabkan Sekolah Cerdas kekurangan guru. Pihak pengelola Sekolah Cerdas akan mencari guru baru, dan mereka diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk menjadi guru huni. Menjelang SK Ngangkatan guru huni ini selesai, maka guru ini akan menghonor di Sekolah Cerdas menjadi guru Sukarela. Honor guru sukarela inilah yang ditanggung oleh seluruh guru Sekolah Cerdas yang ada. Kebijakan ini

tidak ada di dalam panduan pendidikan anak marjinal, maupun di dalam Juknis Pengelolaan Pendidikan Marjinal. Hal ini hanya berdasarkan kebijakan pengelola Sekolah Cerdas. Tidak mungkin guru yang telah membantu mengajar di Sekolah Cerdas tidak mendapat gaji satu rupiah pun, minimal untuk membantu dana transportasi guru ke sekolah. Inilah yang menjadi dasar kebijakan yang dibuat oleh pengelola Sekolah Cerdas.

SIMPULAN

Kehadiran Sekolah Cerdas, yang baru memiliki sejarah singkat (berdiri tahun 2007) untuk ukuran sebuah organisasi, tidak dapat dipungkiri merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru. Sekolah Cerdas telah memenuhi hak pendidikan dan perlindungan anak kepada kaum marjinal meskipun belum sempurna. Oleh karena itu upaya-upaya yang bertujuan pada pemenuhan dan perlindungan hak anak perlu dilanjutkan dan didukung. Sekolah Cerdas memiliki landasan hukum yang kuat untuk ditindaklanjuti dan dikembangkan, dan tidak dibiarkan berlangsung apa adanya. Dalam konteks ini perlu diimbau masyarakat luas agar lebih sensitif berpihak kepada saudara kita yang kurang beruntung secara ekonomi. Misalnya dengan membuat suatu gerakan dan ajakan yang monumental. Kurikulum Sekolah Cerdas setara dengan pendidikan formal tingkat dasar. Hal ini perlu dikaji manakala secara fakta bahwa kaum marjinal (anak) kurang memerlukan sekolah formal dibandingkan dengan semacam sekolah yang memebri bekal dengan orientasi *life skill*.

DAFTAR RUJUKAN

- Arif Rohman, 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Meidatama
- British Broadcasting Company (BBC) Web, 2014. *Murid minoritas di India hadapi diskriminasi* BBC News Indonesia, 22 April 2014, pada URL: http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/04/140422_pendidikan_india_diskriminasi

- atau <http://www.bbc.com/>. Diakses pada Agustus 2014
- Creswell, John, W.. 2011. *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan*. Alih Bahasa: M. Diah. Pekanbaru: UMRI Press.
- David Berry, 1982. *Pokok-pokok pemikiran dalam Sosial*. Terjemahan Paulus Wirotomo. Jakarta: Rajawali.
- Jonathan Sarwono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Juknis Pendidikan Perlindungan Anak Marjinal. 2011.
- Mulyasa. 2009. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mursyal. 2007. *Panduan dan Potret Pendidikan Anak Marginal; Upaya Mencerdaskan Anak Bangsa Sampai ke Pelosok Negeri*. Pekanbaru: UNRI Press.
- Noeng Muhamad, 1993. *Perencanaan dan kebijakan Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Jogyakarta: Reka Sarasin
- Solichin, Abdul Wahab, 2011, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: UMM Press.
- Tajhcan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tata Mustasya, 2009. Janji Kampanye dan Kaum Marjinal, *Demokrasi*. Web Uni Sosial Demokrasi, http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=10857&coid=3&caid=31&gid=2, Mahasiswa University of Turin dan ITC-ILO
- Tilaar H.A R., 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.